

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT
DI DESA PONDOK BATU KECAMATAN BILAH HULU
KABUPATEN LABUHANBATU**

SKRIPSI

OLEH:

**ZATHA YUMNI SIREGAR
NPM. 158520036**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

Access From (repository.uma.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Agustus 2019



Zatha

ZATHA YUMNI SIREGAR

NPM. 158520063



Scanned with
CamScanner

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZATHA YUMNI SIREGAR
NPM : 158520036
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DI DESA PONDOK BATU KECAMATAN BILAH HULU KABUPATEN LABUHANBATU

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 26 Agustus 2019

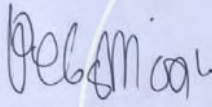
Yang menyatakan

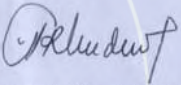


(ZATHA YUMNI SIREGAR)

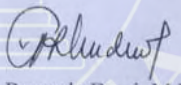
Judul Skripsi : Implementasi Program Kampung KB Dalam Meningkatkan
Kualitas Hidup Masyarakat Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah
Hulu Kabupaten Labuhanbatu
Nama : Zatha Yumni Siregar
NPM : 158520036
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Beby Mashito Batubara, S.Sos.M.AP
Pembimbing I


Dra. Rosmala Dewi, M.Pd
Pembimbing II


Dr. Heri Kusmanto, MA
Dekan


Dra. Rosmala Dewi, M.Pd
Ka. Prodi

Tanggal Lulus : 28 Agustus 2019

 Scanned with
CamScanner

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

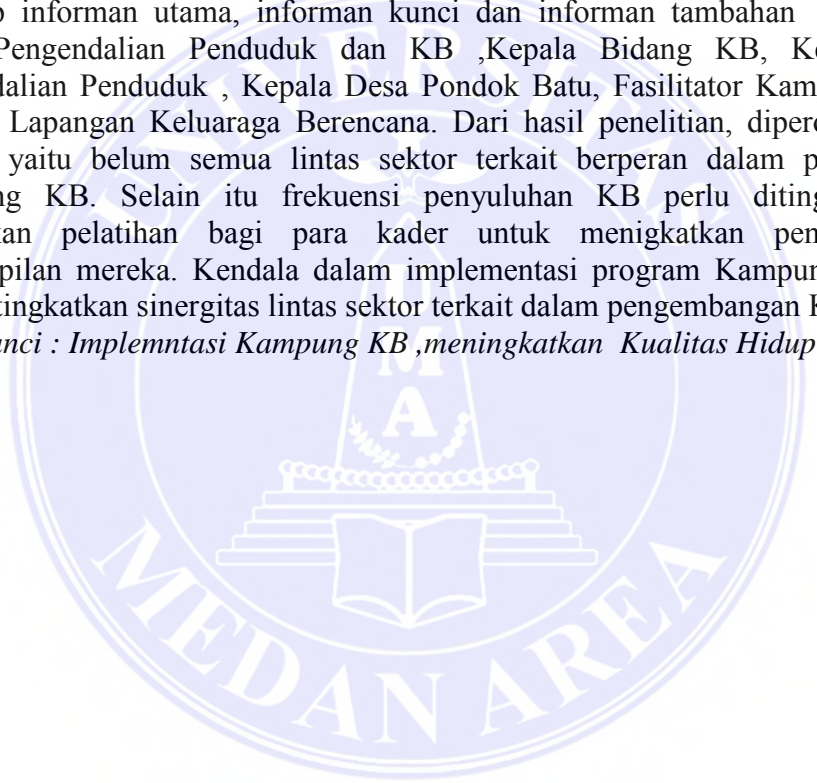
Access From (repository.uma.ac.id)

ABSTRAK

Implementasi Program Kampung KB Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga di Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Kampung KB dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga di Desa Pondok Batu. Metode Penelitian adalah Kualitatif Teknik Pengumpulan Data dilakukan di lokasi penelitian. Wawancara langsung dilakukan terhadap informan utama, informan kunci dan informan tambahan yaitu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kepala Bidang KB, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Kepala Desa Pondok Batu, Fasilitator Kampung KB dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Dari hasil penelitian, diperoleh beberapa temuan yaitu belum semua lintas sektor terkait berperan dalam pengembangan Kampung KB. Selain itu frekuensi penyuluhan KB perlu ditingkatkan serta diperlukan pelatihan bagi para kader untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Kendala dalam implementasi program Kampung KB adalah perlu ditingkatkan sinergitas lintas sektor terkait dalam pengembangan Kampung KB.

Kata Kunci : Implementasi Kampung KB, meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga

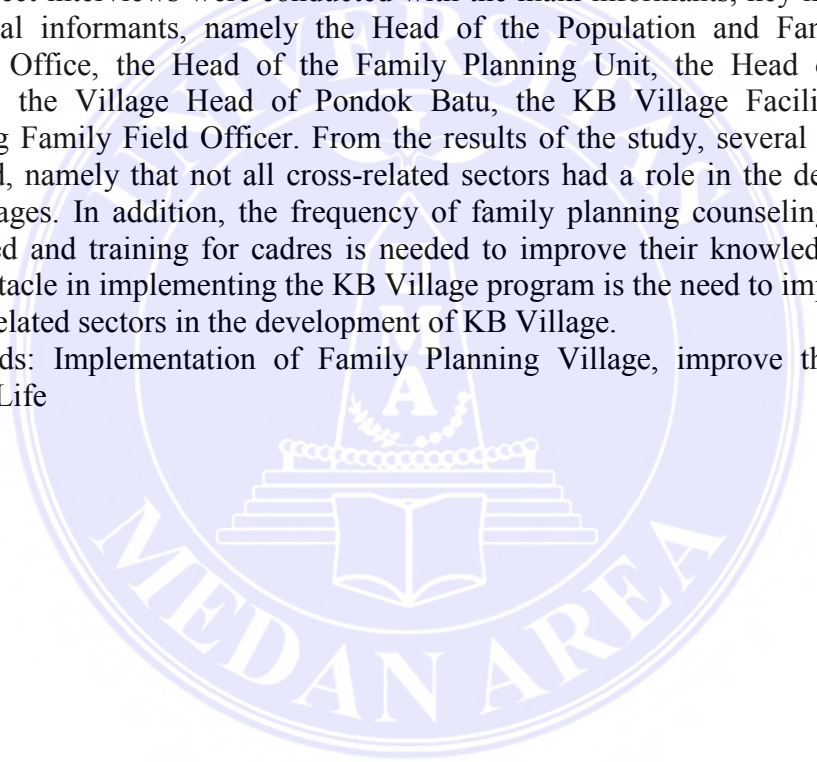


ABSTRACT

Implementation of KB Village Program in Improving Quality of Life Families in Pondok Batu Village, Bilah Hulu Sub-District

The Population and Family Planning Control Office of Labuhanbatu Regency is a Regional Devices Organization that handles population control and family planning matters. This study aims to find out how the implementation of the KB Village program in improving the quality of family life in the village of Pondok Batu. Research Methods are Qualitative Data Collection Techniques carried out at the study site. Direct interviews were conducted with the main informants, key informants and additional informants, namely the Head of the Population and Family Planning Control Office, the Head of the Family Planning Unit, the Head of Population Control, the Village Head of Pondok Batu, the KB Village Facilitator and the Planning Family Field Officer. From the results of the study, several findings were obtained, namely that not all cross-related sectors had a role in the development of KB villages. In addition, the frequency of family planning counseling needs to be improved and training for cadres is needed to improve their knowledge and skills. The obstacle in implementing the KB Village program is the need to improve synergy across related sectors in the development of KB Village.

Keywords: Implementation of Family Planning Village, improve the Quality of Family Life

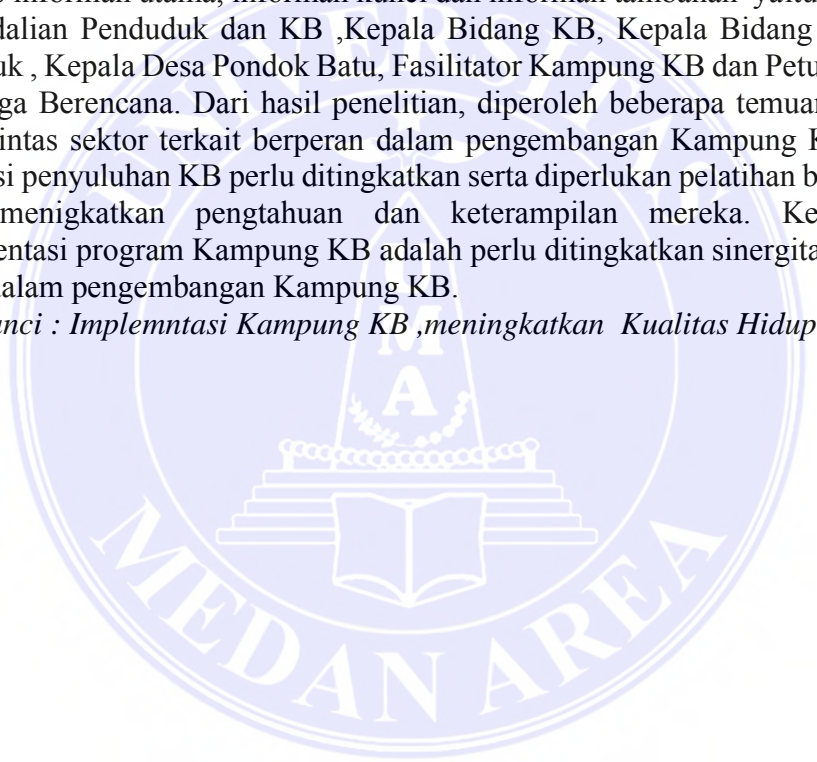


ABSTRAK

Implementasi Program Kampung KB Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga di Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Kampung KB dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga di Desa Pondok Batu. Metode Penelitian adalah Kualitatif Teknik Pengumpulan Data dilakukan di lokasi penelitian. Wawancara langsung dilakukan terhadap informan utama, informan kunci dan informan tambahan yaitu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kepala Bidang KB, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Kepala Desa Pondok Batu, Fasilitator Kampung KB dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Dari hasil penelitian, diperoleh beberapa temuan yaitu belum semua lintas sektor terkait berperan dalam pengembangan Kampung KB. Selain itu frekuensi penyuluhan KB perlu ditingkatkan serta diperlukan pelatihan bagi para kader untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Kendala dalam implementasi program Kampung KB adalah perlu ditingkatkan sinergitas lintas sektor terkait dalam pengembangan Kampung KB.

Kata Kunci : Implementasi Kampung KB, meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga



ABSTRACT

Implementation of KB Village Program in Improving Quality of Life Families in Pondok Batu Village, Bilah Hulu Sub-District

The Population and Family Planning Control Office of Labuhanbatu Regency is a Regional Devices Organization that handles population control and family planning matters. This study aims to find out how the implementation of the KB Village program in improving the quality of family life in the village of Pondok Batu. Research Methods are Qualitative Data Collection Techniques carried out at the study site. Direct interviews were conducted with the main informants, key informants and additional informants, namely the Head of the Population and Family Planning Control Office, the Head of the Family Planning Unit, the Head of Population Control, the Village Head of Pondok Batu, the KB Village Facilitator and the Planning Family Field Officer. From the results of the study, several findings were obtained, namely that not all cross-related sectors had a role in the development of KB villages. In addition, the frequency of family planning counseling needs to be improved and training for cadres is needed to improve their knowledge and skills. The obstacle in implementing the KB Village program is the need to improve synergy across related sectors in the development of KB Village.

Keywords: Implementation of Family Planning Village, improve the Quality of Family Life

KATA PENGANTAR

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ridhoNYA sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis melalui berbagai hal, namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya peneliti memperoleh informasi, data serta berbagai hal diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Babah dan Mama serta adikku Dhanty atas doa dan dukungannya selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr.Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Beby Mashita Batubara, S.Sos.M.AP, selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Rosmala Dewi, M.Pd selaku Pembimbing II salam hormat saya atas berbagai masukan dan saran hingga penulis dapat menyelesaikan tahapan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Aisyah Putri, M.AP selaku Sekretaris Pembimbing yang memberikan berbagai informasi tentang penulisan skripsi ini.
5. Rekan-rekan saya Administrasi Publik Angkatan 2015 FISIP UMA.

6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Labuhanbatu Ibu Hj. Lidiyawati Harahap, S.Psi,M.AP beserta jajarannya yang sudah memberikan ijin penelitian dan sangat membantu selama proses penelitian dan pengambilan data di lapangan.
7. Kepala Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Bapak Carli Ester Panahatan yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang diperlukan.
8. Fasilitator Kampung KB Desa Pondok Batu Bapak Paridul, S.Pd yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai sehingga penulis memperoleh informasi yang diperlukan.
9. Petugas Lapangan KB Ibu Dra. Sri Titoni yang telah memberikan data-data yang diperlukan penulis.
10. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis berharap berbagai masukan, kritik serta saran guna penyempurnaan penulisan berikutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk pengembangan kebijakan publik dan dapat dipergunakan bagi kalangan yang membutuhkannya.

Medan, April 2019

Penulis,

ZATHA YUMNI SIREGAR

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK/ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik	7
2.1.1 Konsep Kebijakan Publik	7
2.1.2 Proses Kebijakan Publik	8
2.1.3 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik	11
2.2 Tinjauan Tentang Kualitas Hidup	14
2.2.1 Pengertian kualitas hidup	14
2.2.2 Aspek-aspek kualitas hidup	15
2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup	16
2.2 Program Kampung Keluarga Berencana	18
2.3.1 Konsep Kampung KB	18
2.3.2 Tujuan Kampung KB	19
2.3.3 Persyaratan Pembentukan Kampung KB	20
2.3.4 Kriteria Pemilihan Wilayah Kampung KB	21
2.4 Kerangka Pikir	24
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.3 Informan Penelitian	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5 Teknik Analisis Data	29
3.6 Teknik Keabsahan Data	31

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	33
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.1.2 Tugas dan Fungsi	33
4.1.3 Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	39
4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	40
4.2 Kampung KB Desa Pondok Batu	41
4.2.1 Sejarah Desa Pondok Batu	41
4.2.2 Profil Penduduk Desa Pondok Batu	42
4.3 Penyajian Data	45
4.3.1 Penyajian data tentang Pelaksanaan Program Kampung KB	46
4.3.2 Faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas hidup	59
4.4 Pembahasan	61
4.4.1 Pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Pondok Batu	61
V. SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ridhoNYA sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis melalui berbagai hal, namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya peneliti memperoleh informasi, data serta berbagai hal diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Babah dan Mama serta adikku Dhanty atas doa dan dukungannya selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr.Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Beby Mashita Batubara, S.Sos.M.AP, selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Rosmala Dewi, M.Pd selaku Pembimbing II salam hormat saya atas berbagai masukan dan saran hingga penulis dapat menyelesaikan tahapan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Aisyah Putri, M.AP selaku Sekretaris Pembimbing yang memberikan berbagai informasi tentang penulisan skripsi ini.
5. Rekan-rekan saya Administrasi Publik Angkatan 2015 FISIP UMA.

6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Labuhanbatu Ibu Hj. Lidiyawati Harahap, S.Psi,M.AP beserta jajarannya yang sudah memberikan ijin penelitian dan sangat membantu selama proses penelitian dan pengambilan data di lapangan.
7. Kepala Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Bapak Carli Ester Panahatan yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang diperlukan.
8. Fasilitator Kampung KB Desa Pondok Batu Bapak Paridul, S.Pd yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai sehingga penulis memperoleh informasi yang diperlukan.
9. Petugas Lapangan KB Ibu Dra. Sri Titoni yang telah memberikan data-data yang diperlukan penulis.
10. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis berharap berbagai masukan, kritik serta saran guna penyempurnaan penulisan berikutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk pengembangan kebijakan publik dan dapat dipergunakan bagi kalangan yang membutuhkannya.

Medan, April 2019

Penulis,

ZATHA YUMNI SIREGAR

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK/ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik	7
2.1.1 Konsep Kebijakan Publik	7
2.1.2 Proses Kebijakan Publik	8
2.1.3 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik	11
2.2 Tinjauan Tentang Kualitas Hidup	14
2.2.1 Pengertian kualitas hidup	14
2.2.2 Aspek-aspek kualitas hidup	15
2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup	16
2.2 Program Kampung Keluarga Berencana	18
2.3.1 Konsep Kampung KB	18
2.3.2 Tujuan Kampung KB	19
2.3.3 Persyaratan Pembentukan Kampung KB	20
2.3.4 Kriteria Pemilihan Wilayah Kampung KB	21
2.4 Kerangka Pikir	24
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.3 Informan Penelitian	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5 Teknik Analisis Data	29
3.6 Teknik Keabsahan Data	31
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

4.1 Hasil Penelitian	33
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.1.2 Tugas dan Fungsi	33
4.1.3 Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	39
4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	40
4.2 Kampung KB Desa Pondok Batu	41
4.2.1 Sejarah Desa Pondok Batu	41
4.2.2 Profil Penduduk Desa Pondok Batu	42
4.3 Penyajian Data	45
4.3.1 Penyajian data tentang Pelaksanaan Program Kampung KB	46
4.3.2 Faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas hidup.....	59
4.4 Pembahasan	61
4.4.1 Pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Pondok Batu.....	61
 V. SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	67
5.2 Saran	68
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016, program Kampung Keluarga Berencana yang lebih dikenal dengan Kampung KB terus tumbuh pesat. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat lingkungan atau dusun yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor lainnya seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya yang dilaksanakan secara sistematis.

Tepatnya tanggal 23 Mei 2017 dilakukan Pencanaan Kampung KB Serentak Kabupaten Labuhanbatu dimana terdapat satu kampung KB di setiap kecamatan. Pelaksanaan perencanaan ini dilakukan di Kampung KB Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu.

Saat ini program Kampung KB merupakan salah satu inovasi strategis pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di daerah padat penduduk, kumuh, daerah aliran sungai dan bantaran kereta api. Kedepannya, Kampung KB akan menjadi ikon program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Prinsip Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Keberhasilan program KKBPK dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek pengendalian kuantitas penduduk, kedua, aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusuri melalui berbagai indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan delapan fungsi keluarga. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam PP disebutkan delapan fungsi keluarga meliputi (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi sosial budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.

Kampung KB juga merupakan wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan Nawacita ke 3, 5, dan 8. Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta Nawacita kedelapan yaitu melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan dan budi pekerti yang dimulai dari keluarga.

Manfaat Kampung KB selain dapat mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Intinya program ini melibatkan semua sektor pembangunan. Dengan kata lain, Kampung KB tidak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan.

Manfaat lainnya adalah membangun masyarakat berbasis keluarga, mensejahterakan masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor. Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran berbagai pihak seperti organisasi masyarakat, pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya. Integrasi lintas sektor berupa pelayanan terpadu antar sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan KB, pelayanan pembuatan akta, pembangunan jalan dan jembatan, pembuatan KTP, penyediaan buku-buku bacaan, posyandu, PAUD dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data keluarga tahun 2018, bahwa jumlah penduduk Desa Pondok Batu tercatat sebanyak 1.932 (seribu sembilanratus tigapuluh dua ribu) jiwa terdiri dari laki-laki 951 (sembilanratus limapuluh satu) jiwa dan perempuan 981 (sembilanratus delapanpuluh satu) jiwa. Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 517 (limaratus tujuhbelas) terdiri dari keluarga Pra Sejahtera 52 KK, Keluarga Sejahtera 20 KK, Keluarga Sejahtera II 168, serta Keluarga Sejahtera III dan III Plus sebanyak 277 KK.

Dipilihnya Desa Pondok Batu sebagai salah satu Kampung KB di Kecamatan Bilah Hulu karena memenuhi kriteria utama lainnya yaitu pencapaian peserta KB-nya paling rendah dari 24 Desa yang ada. Sebelum dikembangkannya Kampung KB,

akhir tahun 2016 capaian peserta KB Aktif hanya sebesar 42 % dari total jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada. Sampai dengan Agustus 2018, tercatat sebanyak 281 peserta KB Aktif dari total PUS sebanyak 360. Artinya terdapat peningkatan peserta KB Aktif menjadi 78 %. Selain itu perkawinan usia dini masih tinggi dan berdampak pada kasus KDRT juga menjadi kriteria khusus yang membutuhkan intervensi lintas sektor yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu. Di desa tersebut juga masih terdapat penduduk yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga Di Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi program Kampung KB dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga di Desa Pondok Batu?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi Kampung KB di Desa Pondok Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui implementasi program Kampung KB dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga di Desa Pondok Batu.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi program Kampung KB di Desa Pondok Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan peneliti dan menambah penelitian/kajian yang berguna dalam implementasi kebijakan publik.
2. Sedangkan manfaat praktisnya adalah penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi instansi dan pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan program Kampung KB khususnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016, program Kampung Keluarga Berencana yang lebih dikenal dengan Kampung KB terus tumbuh pesat. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat lingkungan atau dusun yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor lainnya seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya yang dilaksanakan secara sistematis.

Tepatnya tanggal 23 Mei 2017 dilakukan Pencanangan Kampung KB Serentak Kabupaten Labuhanbatu dimana terdapat satu kampung KB di setiap kecamatan. Pelaksanaan pencanangan ini dilakukan di Kampung KB Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu.

Saat ini program Kampung KB merupakan salah satu inovasi strategis pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di daerah padat penduduk, kumuh, daerah aliran sungai dan bantaran kereta api. Kedepannya, Kampung KB akan menjadi ikon program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Prinsip Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Keberhasilan program KKBPK dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek pengendalian kuantitas penduduk, kedua, aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusuri melalui berbagai indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan delapan fungsi keluarga. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam PP disebutkan delapan fungsi keluarga meliputi (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi sosial budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.

Kampung KB juga merupakan wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan Nawacita ke 3, 5, dan 8. Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta Nawacita kedelapan yaitu melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan dan budi pekerti yang dimulai dari keluarga.

Manfaat Kampung KB selain dapat mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Intinya program ini melibatkan semua sektor pembangunan. Dengan kata lain, Kampung KB tidak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan.

Manfaat lainnya adalah membangun masyarakat berbasis keluarga, mensejahterakan masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor. Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran berbagai pihak seperti organisasi masyarakat, pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya. Integrasi lintas sektor berupa pelayanan terpadu antar sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan KB, pelayanan pembuatan akta, pembangunan jalan dan jembatan, pembuatan KTP, penyediaan buku-buku bacaan, posyandu, PAUD dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data keluarga tahun 2018, bahwa jumlah penduduk Desa Pondok Batu tercatat sebanyak 1.932 (seribu sembilanratus tigapuluh dua ribu) jiwa terdiri dari laki-laki 951 (sembilanratus limapuluh satu) jiwa dan perempuan 981 (sembilanratus delapanpuluh satu) jiwa. Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 517 (limaratus tujuhbelas) terdiri dari keluarga Pra Sejahtera 52 KK, Keluarga Sejahtera 20 KK, Keluarga Sejahtera II 168, serta Keluarga Sejahtera III dan III Plus sebanyak 277 KK.

Dipilihnya Desa Pondok Batu sebagai salah satu Kampung KB di Kecamatan Bilah Hulu karena memenuhi kriteria utama lainnya yaitu pencapaian peserta KB-nya paling rendah dari 24 Desa yang ada. Sebelum dikembangkannya Kampung KB, akhir

tahun 2016 capaian peserta KB Aktif hanya sebesar 42 % dari total jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada. Sampai dengan Agustus 2018, tercatat sebanyak 281 peserta KB Aktif dari total PUS sebanyak 360. Artinya terdapat peningkatan peserta KB Aktif menjadi 78 %. Selain itu perkawinan usia dini masih tinggi dan berdampak pada kasus KDRT juga menjadi kriteria khusus yang membutuhkan intervensi lintas sektor yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu. Di desa tersebut juga masih terdapat penduduk yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga Di Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi program Kampung KB dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga di Desa Pondok Batu?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi Kampung KB di Desa Pondok Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui implementasi program Kampung KB dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga di Desa Pondok Batu.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi program Kampung KB di Desa Pondok Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan peneliti dan menambah penelitian/kajian yang berguna dalam implementasi kebijakan publik.
2. Sedangkan manfaat praktisnya adalah penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi instansi dan pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan program Kampung KB khususnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

1.1.1 Konsep Kebijakan Publik

Berbagai pandangan tentang kebijakan publik diutarakan oleh para ahli, dimana setiap definisi memberikan penekanan yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena masing-masing ahli memiliki latar belakang yang berbeda.

Menurut Anderson dalam Mulyadi (2016:165) kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan atau tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Nugroho dalam Mulyadi (2016:165) mengemukakan kebijakan publik adalah usaha pencapaian tujuan atau sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan yang dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauh mana kemajuan pencapaian yang telah ditempuh.

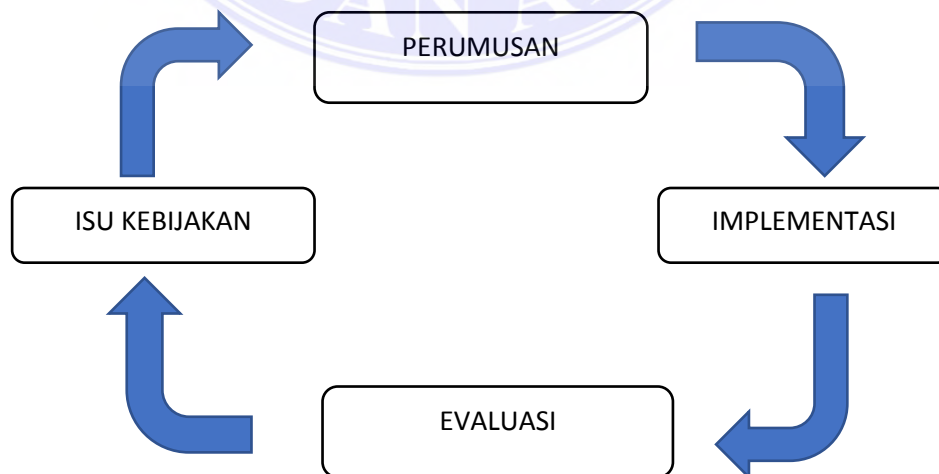
Menurut Dye dalam Suaib (2016:72), kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Jenkin dalam Suaib (2016:74) mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan, yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik

berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang telah ditentukan oleh pemerintah (instansi publik) dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan bertujuan untuk mengatur kepentingan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan publik juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dipatuhi. Kebijakan publik tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk tujuan, sasaran dari program-program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

2.1.2 Proses Kebijakan Publik

Nugroho (2014:199) mengemukakan dasar proses kebijakan publik sebagai berikut :



Gambar. 1 **Proses Kebijakan Publik**

Gambar tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Isu kebijakan. Disebut isu apabila bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, yang menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, biasanya berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang per-orang. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan. Isu kebijakan terdiri dari dua jenis yaitu *problem* dan *goal*. Artinya kebijakan publik dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul di kehidupan publik dan dapat berorientasi pada permasalahan pada *goal* atau tujuan yang hendak dicapai pada kehidupan publik. Pada saat itu sebagian besar kebijakan publik mengacu pada permasalahan daripada antisipasi ke depan, dalam bentuk *goal oriented policy*, sehingga kebijakan publik terlihat tertatih-tatih di belakang masalah publik yang terus bermunculan dan akhirnya semakin tak tertangani.
2. Isu kebijakan ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh warga negara termasuk pimpinan negara.
3. Setelah dirumuskan, kebijakan publik ini kemudian dilaksanakan baik oleh pemerintah ataupun masyarakat.
4. Namun dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan diperlakukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru untuk dinilai apakah

kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.

5. Implementasi kebijakan bermuara pada output yang berupa kebijakan itu sendiri ataupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
6. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut menghasilkan keluaran (*outcome*) dalam bentuk *impact* kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

2.1.3 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Mazmanian dan Sebatier dalam Wahab (2012:135), implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat.

Grindle dalam Agustino (2008:139), mendefinisikan keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah

pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program (sasaran) dan apakah tujuan program tercapai. Tahap implementasi kebijakan sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Dengan kata lain proses implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu pelaksanaan atau tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk melaksanakan keputusan demi tercapainya tujuan atau sasaran yang diinginkan dari proses kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini digunakan model implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn. Keberhasilan implementasi menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:141), terdapat enam variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga adalah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri agen pelaksananya. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan ketika hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen pelaksana yang dilibatkan.

4. Sikap kecenderungan para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan mempengaruhi berhasil tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil formulasi warga setempat

yang mengenal betul permasalahan yang mereka rasakan akan tetapi kebijakan dari atas (*top down*) yang mungkin saja tidak menyentuh permasalahan yang sebenarnya.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat, maka kesalahan akan sangat kecil terjadi.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi faktor kegagalan implementasi kebijakan.

Digunakannya teori implementasi kebijakan publik dari Van Metter dan Van Horn karena terdapat enam variabel tersebut di atas yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam penelitian ini, kebijakan publik yaitu program Kampung KB bersifat nasional yang berasal dari pemerintah pusat (*top down*) dan harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota). Implementasi program Kampung KB akan berhasil apabila ada dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah melalui Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) KB. OPD KB merupakan pelaksana dari kebijakan program Kampung KB dimana partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan program tersebut. Selain itu faktor pendukung lainnya adalah finansial/dana berupa anggaran yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (kabupaten/kota). Pengembangan program Kampung KB dilakukan secara bertahap sejak tahun 2016 hingga saat ini. Hal ini

menyangkut keberhasilan Kampung KB yang dapat diukur dari tahun ke tahun (sumberdaya waktu).

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Turner dan Hulme dalam Pasolong (2011:59) dalam praktiknya, implementasi kebijakan mengalami berbagai hambatan yang dapat berasal dari dalam (faktor internal) maupun dari luar (faktor eksternal).

- a. Hambatan dari dalam (faktor internal) yaitu ketersediaan dan kualitas sumberdaya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki serta aturan-aturan, sistem dan prosedur yang digunakan.
- b. Hambatan dari luar (faktor eksternal) yaitu semua hal yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung dalam proses implementasi kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kondisi ekonomi, sosial budaya dan politik.

2.2 Tinjauan Tentang Kualitas Hidup

2.2.1 Pengertian Kualitas Hidup

Menurut pandangan beberapa ahli, kualitas hidup berkaitan dengan pencapaian kehidupan manusia yang ideal atau sesuai dengan yang diinginkan (Diener dan Suh dalam Nofitri, 2009). Goodinson dan Singleton (O'Connor, 1993) mengatakan bahwa kualitas hidup sebagai derajat kepuasan atas penerimaan suasana kehidupan saat ini. Sedangkan Calman mengatakan bahwa kualitas hidup yang dapat diterima secara umum menyangkut perasaan subjektif seseorang mengenai kesejahteraan dirinya, berdasarkan pengalaman hidupnya saat ini secara keseluruhan (O'Connor, 1993)

World Health Organization (WHO) (dalam Kwan, 2000) mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu mengenai posisi individu dalam kehidupan dilihat dari konteks budaya dan sistem nilai dimana individu tinggal dan hubungannya dengan tujuan, harapan, standard dan hal-hal lain yang menjadi perhatian individu tersebut.

Berdasarkan definisi Calman dan WHO mengaplikasikan bahwa kualitas hidup ditentukan oleh persepsi individual mengenai kondisi kehidupannya saat ini.

Menurut HORMUIST kualitas hidup sebagai tingkat kepuasan hidup individu pada area fisik kualitas hidup sebagai tingkat kepuasan hidup individu pada area fisik, psikologis, sosial, aktivitas, materi dan kebutuhan struktural. Ferrans mendefinisikan kualitas hidup sebagai perasaan sejahtera individu yang berasal dari rasa puas atau tidak puas individu dengan area kehidupan yang penting baginya.

Beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup merupakan perasaan subjektif seseorang mengenai kesejahteraan dirinya berdasarkan pengalaman hidupnya saat ini secara keseluruhan. Kualitas hidup menggambarkan pencapaian kehidupan manusia yang ideal atau sesuai dengan yang diinginkan.

2.2.2 Aspek – Aspek Kualitas Hidup Keluarga

Berawal dari pemikiran mengenai aspek kualitas hidup yang dapat berbeda antara individu satu dengan individu lainnya, berbagai studi kualitas hidup meneliti aspek-aspek kehidupan yang penting bagi individu dalam hubungannya dengan kualitas hidup.

Dalam penelitian ini aspek kualitas hidup yang digunakan berdasarkan definisi dari WHO (World Health Organization) dan beberapa pendapat ahli. Terdapat empat aspek kualitas hidup yaitu :

a. Aspek kesehatan fisik

Kesehatan fisik dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk melakukan aktivitas yang memberikan pengalaman baru yang merupakan modal perkembangan ke tahapan selanjutnya.

b. Aspek psikologis

Aspek psikologis terkait dengan keadaan mental individu yang mengarah pada mampu atau tidaknya individu menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan perkembangan baik yang berasal dari dalam diri maupun lingkungan.

c. Aspek hubungan sosial

Aspek hubungan sosial yaitu hubungan antara dua individu atau lebih dimana tingkah laku individu tersebut akan saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki tingkah laku individu lainnya.

d. Aspek lingkungan

Aspek lingkungan yaitu tempat tinggal individu termasuk didalamnya ketersediaan tempat tinggal untuk melakukan segala aktivitas kehidupan, termasuk sarana dan prasarana yang dapat menunjang kehidupan.

2.2.3 Faktor – Faktor yang mempengaruhi Kualitas Hidup

Kualitas hidup secara langsung dipengaruhi oleh pengalaman pengasuhan baik yang positif maupun negatif serta kondisi stres. Sumber daya ekonomi dan sumber

daya sosial memiliki dampak langsung pada kualitas hidup. Ferrans dan Powers (dalam Kwan, 2000) empat domain yang sangat penting untuk kualitas hidup yaitu kesehatan dan fungsi, sosial ekonomi, psikologis/spiritual, dan keluarga. Domain kesehatan dan fungsi meliputi aspek – aspek seperti kegunaan kepada orang lain dan kemandirian fisik. Domain sosial ekonomi berkaitan dengan standar hidup, kondisi lingkungan, teman-teman dan sebagainya. Domain psikologis/spiritual meliputi kebahagiaan, ketenangan, pikiran dan kendali atas kehidupan dan faktor lainnya. Domain keluarga meliputi kebahagiaan keluarga, anak-anak, pasangan dan kesehatan keluarga.

Menurut Ghozally (dalam Larasari, 2009) faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup diantaranya mengenali diri sendiri, adaptasi merasakan penderitaan orang lain, perasaan dan kasih sayang, bersikap optimis, mengembangkan sikap empati.

Faktor – Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup:

a. Jenis kelamin

Fadda dan Jiron (1999) mengatakan bahwa laki- laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam peran serta akses dan kendali terhadap berbagai sumber sehingga kebutuhan atau hal-hal yang penting bagi laki-laki dan perempuan juga akan berbeda. Ryff dan Singer (1998) mengatakan bahwa secara umum, kesejahteraan laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda, namun perempuan lebih banyak terkait dengan aspek hubungan yang bersifat positif sedangkan kesejahteraan laki-laki lebih terkait dengan aspek pendidikan pekerjaan yang lebih baik.

b. Usia

Wagner, Abbott dan Lett (2004) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang terkait dengan usia dalam aspek-aspek kehidupan yang penting bagi individu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ryff dan Singer (1996) individu dewasa mengekspresikan kesejahteraan yang lebih tinggi pada usia dewasa madya (60 tahun).

c. Pendidikan

Pendidikan juga merupakan faktor kualitas hidup, senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahl dkk (2004) menemukan bahwa kualitas hidup akan meningkat seiring dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi yang dicapai oleh individu.

d. Pekerjaan

Hultman, Hemlin dan H "ornquist (2006) menunjukkan dalam hal kualitas hidup juga diperoleh hasil penelitian yang tidak jauh berbeda dimana individu yang bekerja memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan individu yang tidak bekerja .

e. Status pernikahan

Penelitian yang dilakukan Hultman, Hemlin dan H "ornquist (2006), secara umum menunjukkan bahwa individu yang menikah memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi daripada individu yang tidak menikah atau bercerai.

2.3 Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB)

2.3.1 Konsep Kampung KB

Kampung KB merupakan program strategis dalam meretas kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, kampung atau dusun yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait lainnya yang dilaksanakan secara sistematis dan sistematis. Kampung KB merupakan salah satu model pelaksanaan total program KKBPK serta merupakan program strategis dalam upaya percepatan agenda program pembangunan khususnya pada daerah pinggiran.

Kampung KB dibentuk sebagai salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

2.3.2 Tujuan Kampung KB

Secara umum, tujuan program Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Sedangkan secara khusus, Kampung KB bertujuan untuk :

1. Meningkatkan peran pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta untuk menyelenggarakan program kependudukan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.
3. Meningkatkan peserta KB aktif.
4. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) serta Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
5. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
7. Menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung.
9. Meningkatkan lingkungan kampung yang bersih dan sehat.
10. Meningkatkan angka partisipasi sekolah.

2.3.3 Prasyarat Pembentukan Kampung KB

Dalam petunjuk teknis pelaksanaan Kampung KB dari BKKBN, perlu diperhatikan beberapa persyaratan dalam menentukan suatu wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB, yaitu :

- a. Tersedianya data kependudukan yang akurat. Data ini bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data Potensi Desa dan data Catatan Sipil yang akan

digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah Kampung KB secara berkesinambungan.

- b. Dukungan dan komitmen pemerintah daerah. Dukungan, komitmen dan peran aktif seluruh instansi/organisasi perangkat daerah (OPD), Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB. Selain itu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang dan urusan masing-masing OPD untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- c. Partisipasi aktif masyarakat adalah partisipasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di Kampung KB secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.3.4 Kriteria Pemilihan Wilayah Kampung KB

Dalam memilih dan menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB ada tiga kriteria yang dipakai, yaitu :

- a. Kriteria Utama
 1. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS I (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berada.
 2. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan dimana lokasi kampung tersebut.
- b. Kriteria Wilayah dalam pembentukan Kampung KB mencakup 10 kategori wilayah (dipilih salah satu), yaitu :
 1. Kumuh
 2. Pesisir atau Nelayan

3. Daerah Aliran Sungai (DAS)
4. Bantaran Kereta Api
5. Kawasan Miskin (termasuk miskin perkotaan)
6. Terpencil
7. Perbatasan
8. Kawasan Industri
9. Kawasan Wisata
10. Padat Penduduk

c. Kriteria Khusus

1. Kriteria data dimana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari Hasil Pendataan Keluarga, Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akurat.
2. Kriteria kependudukan dimana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah.
3. Kriteria program Keluarga Berencana dimana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa atau kelurahan.

2.4 Kerangka Pikir

Dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan masyarakat dapat menjamin cita-cita keberhasilan pembangunan nasional. Masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi harus dapat menjadi subjek atau pelaku pembangunan. Tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat dari waktu ke waktu. IPM mencakup pembangunan pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Idealnya dengan meningkatnya pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat maka akan meningkat pula pendapatannya.

Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Pada masa orde baru hingga sebelum reformasi, program Keluarga Berencana identik dengan penggunaan alat kontrasepsi. Seiring dengan perkembangan jaman, pemerintah mengembangkan inovasi strategis berupa Kampung KB. Dengan program nasional ini, harapannya persoalan-persoalan kependudukan dapat teratasi melalui peningkatan kualitas keluarga dan kualitas masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Kampung KB merupakan salah satu kebijakan yang harus di implementasikan di tengah-tengah masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Implementasi kebijakan Kampung KB akan berhasil apabila didukung oleh komitmen dan sumberdaya pelaksana program Kampung KB. Selain itu sumberdaya lain yang perlu

diperhitungkan juga adalah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Sejak dicanangkan secara nasional pada Januari 2016, target pengembangan Kampung KB di setiap wilayah kecamatan hingga desa tertinggal dan terpencil dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan sumberdaya waktu.

Dengan adanya koordinasi dan sinergitas lintas sektor terkait dimana hal ini merupakan variabel komunikasi antar organisasi akan mempercepat pencapaian implementasi kebijakan Kampung KB. Di era pemerintahan Jokowi-JK, Kampung KB merupakan perwujudan Nawacita ke-3, ke-5 dan ke-8. Selain itu komitmen terhadap pengembangan Kampung KB sangat dipengaruhi kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

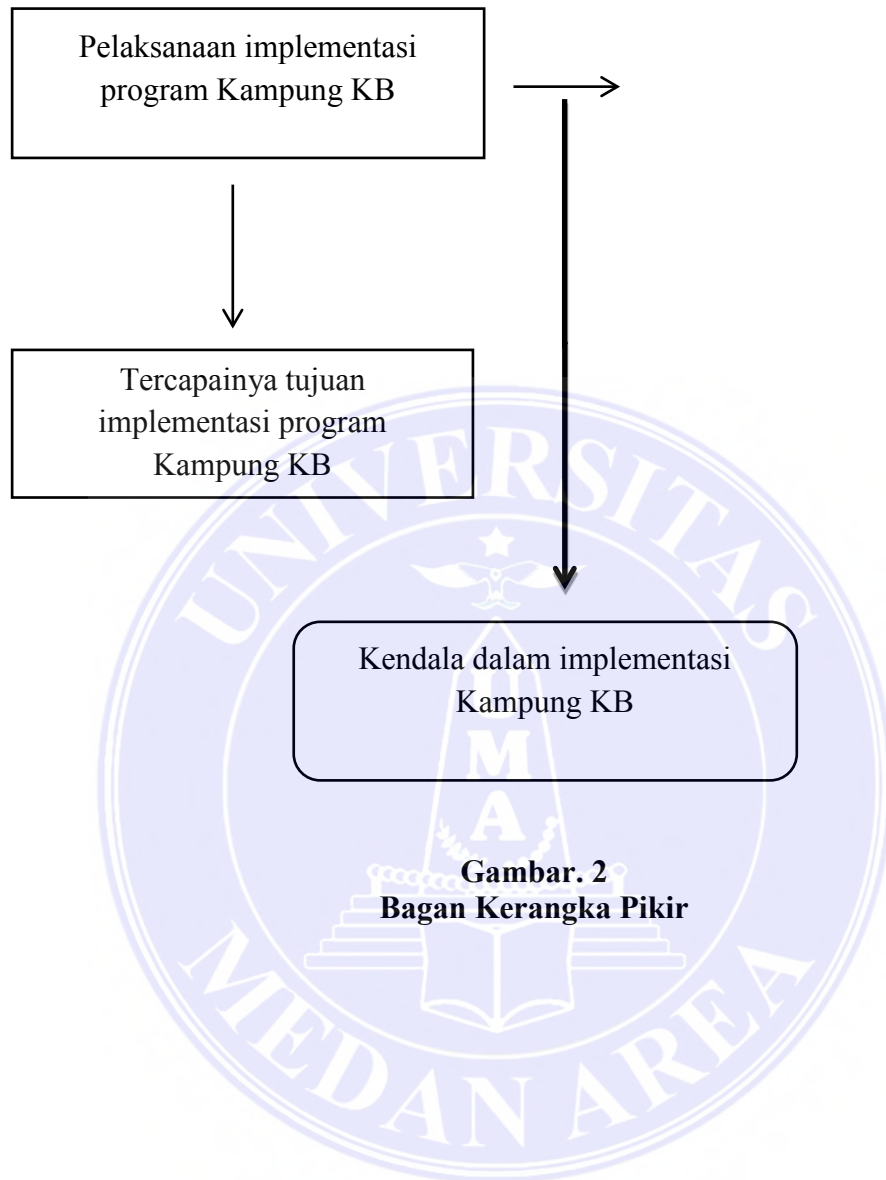
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:141) yang menyatakan bahwa ada enam variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Enam variabel tersebut adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir tersebut digambarkan sebagai berikut :

Upaya peningkatan kualitas keluarga dan kualitas masyarakat melalui program Kampung KB (Undang-Undang Nomor 52



Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:141), terdapat enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik, yaitu :

1. ukuran dan tujuan kebijakan
2. sumberdaya
3. karakteristik agen pelaksana
4. sikap kecenderungan para pelaksana



Gambar. 2
Bagan Kerangka Pikir

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

1.1.1 Konsep Kebijakan Publik

Berbagai pandangan tentang kebijakan publik diutarakan oleh para ahli, dimana setiap definisi memberikan penekanan yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena masing-masing ahli memiliki latar belakang yang berbeda.

Menurut Anderson dalam Mulyadi (2016:165) kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan atau tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Nugroho dalam Mulyadi (2016:165) mengemukakan kebijakan publik adalah usaha pencapaian tujuan atau sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan yang dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauh mana kemajuan pencapaian yang telah ditempuh.

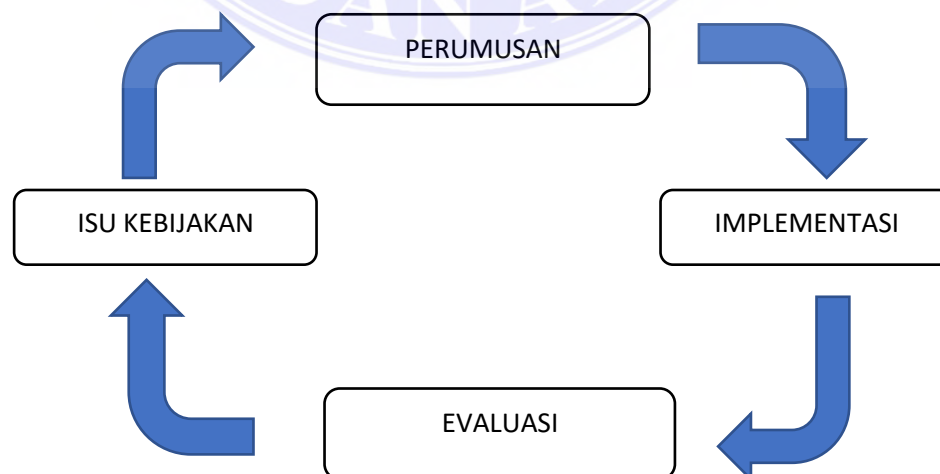
Menurut Dye dalam Suaib (2016:72), kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Jenkin dalam Suaib (2016:74) mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan, yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan

dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang telah ditentukan oleh pemerintah (instansi publik) dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan bertujuan untuk mengatur kepentingan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan publik juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dipatuhi. Kebijakan publik tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk tujuan, sasaran dari program-program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

2.1.2 Proses Kebijakan Publik

Nugroho (2014:199) mengemukakan dasar proses kebijakan publik sebagai berikut :



Gambar. 1 **Proses Kebijakan Publik**

Gambar tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Isu kebijakan. Disebut isu apabila bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, yang menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, biasanya berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang per-orang. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan. Isu kebijakan terdiri dari dua jenis yaitu *problem* dan *goal*. Artinya kebijakan publik dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul di kehidupan publik dan dapat berorientasi pada permasalahan pada *goal* atau tujuan yang hendak dicapai pada kehidupan publik. Pada saat itu sebagian besar kebijakan publik mengacu pada permasalahan daripada antisipasi ke depan, dalam bentuk *goal oriented policy*, sehingga kebijakan publik terlihat tertatih-tatih di belakang masalah publik yang terus bermunculan dan akhirnya semakin tak tertangani.
2. Isu kebijakan ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh warga negara termasuk pimpinan negara.
3. Setelah dirumuskan, kebijakan publik ini kemudian dilaksanakan baik oleh pemerintah ataupun masyarakat.
4. Namun dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan diperlakukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru untuk dinilai apakah

kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.

5. Implementasi kebijakan bermuara pada output yang berupa kebijakan itu sendiri ataupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
6. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut menghasilkan keluaran (*outcome*) dalam bentuk *impact* kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

2.1.3 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Mazmanian dan Sebatier dalam Wahab (2012:135), implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat.

Grindle dalam Agustino (2008:139), mendefinisikan keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah

pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program (sasaran) dan apakah tujuan program tercapai. Tahap implementasi kebijakan sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Dengan kata lain proses implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu pelaksanaan atau tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk melaksanakan keputusan demi tercapainya tujuan atau sasaran yang diinginkan dari proses kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini digunakan model implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn. Keberhasilan implementasi menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:141), terdapat enam variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga adalah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri agen pelaksananya. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan ketika hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen pelaksana yang dilibatkan.

4. Sikap kecenderungan para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan mempengaruhi berhasil tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil formulasi warga setempat yang

mengenal betul permasalahan yang mereka rasakan akan tetapi kebijakan dari atas (*top down*) yang mungkin saja tidak menyentuh permasalahan yang sebenarnya.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat, maka kesalahan akan sangat kecil terjadi.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi faktor kegagalan implementasi kebijakan.

Digunakannya teori implementasi kebijakan publik dari Van Metter dan Van Horn karena terdapat enam variabel tersebut di atas yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam penelitian ini, kebijakan publik yaitu program Kampung KB bersifat nasional yang berasal dari pemerintah pusat (*top down*) dan harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota). Implementasi program Kampung KB akan berhasil apabila ada dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah melalui Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) KB. OPD KB merupakan pelaksana dari kebijakan program Kampung KB dimana partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan program tersebut. Selain itu faktor pendukung lainnya adalah finansial/dana berupa anggaran yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (kabupaten/kota). Pengembangan program Kampung KB dilakukan secara

bertahap sejak tahun 2016 hingga saat ini. Hal ini menyangkut keberhasilan Kampung KB yang dapat diukur dari tahun ke tahun (sumberdaya waktu).

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Turner dan Hulme dalam Pasolong (2011:59) dalam praktiknya, implementasi kebijakan mengalami berbagai hambatan yang dapat berasal dari dalam (faktor internal) maupun dari luar (faktor eksternal).

- a. Hambatan dari dalam (faktor internal) yaitu ketersediaan dan kualitas sumberdaya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki serta aturan-aturan, sistem dan prosedur yang digunakan.
- b. Hambatan dari luar (faktor eksternal) yaitu semua hal yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung dalam proses implementasi kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kondisi ekonomi, sosial budaya dan politik.

2.2 Tinjauan Tentang Kualitas Hidup

2.2.1 Pengertian Kualitas Hidup

Menurut pandangan beberapa ahli, kualitas hidup berkaitan dengan pencapaian kehidupan manusia yang ideal atau sesuai dengan yang diinginkan (Diener dan Suh dalam Nofitri, 2009). Goodinson dan Singleton (O'Connor, 1993) mengatakan bahwa kualitas hidup sebagai derajat kepuasan atas penerimaan suasana kehidupan saat ini. Sedangkan Calman mengatakan bahwa kualitas hidup yang dapat diterima secara umum menyangkut perasaan subjektif seseorang mengenai kesejahteraan dirinya, berdasarkan pengalaman hidupnya saat ini secara keseluruhan (O'Connor, 1993)

World Health Organization (WHO) (dalam Kwan, 2000) mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu mengenai posisi individu dalam kehidupan dilihat dari konteks budaya dan sistem nilai dimana individu tinggal dan hubungannya dengan tujuan, harapan, standard dan hal-hal lain yang menjadi perhatian individu tersebut.

Berdasarkan defenisi Calman dan WHO mengaplikasikan bahwa kualitas hidup ditentukan oleh persepsi individual mengenai kondisi kehidupannya saat ini.

Menurut Hormuist kualitas hidup sebagai tingkat kepuasan hidup individu pada area fisik kualitas hidup sebagai tingkat kepuasan hidup individu pada area fisik, psikologis, sosial, aktivitas, materi dan kebutuhan struktural. Ferrans mendefinisikan kualitas hidup sebagai perasaan sejahtera individu yang berasal dari rasa puas atau tidak puas individu dengan area kehidupan yang penting baginya.

Beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup merupakan perasaan subjektif seseorang mengenai kesejahteraan dirinya berdasarkan pengalaman hidupnya saat ini secara keseluruhan. Kualitas hidup menggambarkan pencapaian kehidupan manusia yang ideal atau sesuai dengan yang diinginkan.

2.2.2 Aspek – Aspek Kualitas Hidup Keluarga

Berawal dari pemikiran mengenai aspek kualitas hidup yang dapat berbeda antara individu satu dengan individu lainnya, berbagai studi kualitas hidup meneliti aspek-aspek kehidupan yang penting bagi individu dalam hubungannya dengan kualitas hidup.

Dalam penelitian ini aspek kualitas hidup yang digunakan berdasarkan definisi dari WHO (World Health Organization) dan beberapa pendapat ahli. Terdapat empat aspek kualitas hidup yaitu :

a. Aspek kesehatan fisik

Kesehatan fisik dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk melakukan aktivitas yang memberikan pengalaman baru yang merupakan modal perkembangan ke tahapan selanjutnya.

b. Aspek psikologis

Aspek psikologis terkait dengan keadaan mental individu yang mengarah pada mampu atau tidaknya individu menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan perkembangan baik yang berasal dari dalam diri maupun lingkungan.

c. Aspek hubungan sosial

Aspek hubungan sosial yaitu hubungan antara dua individu atau lebih dimana tingkah laku individu tersebut akan saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki tingkah laku individu lainnya.

d. Aspek lingkungan

Aspek lingkungan yaitu tempat tinggal individu termasuk didalamnya ketersediaan tempat tinggal untuk melakukan segala aktivitas kehidupan, termasuk sarana dan prasarana yang dapat menunjang kehidupan.

2.2.3 Faktor – Faktor yang mempengaruhi Kualitas Hidup

Kualitas hidup secara langsung dipengaruhi oleh pengalaman pengasuhan baik yang positif maupun negatif serta kondisi stres. Sumber daya ekonomi dan sumber daya

sosial memiliki dampak langsung pada kualitas hidup. Ferrans dan Powers (dalam Kwan, 2000) empat domain yang sangat penting untuk kualitas hidup yaitu kesehatan dan fungsi, sosial ekonomi, psikologis/spritual, dan keluarga. Domain kesehatan dan fungsi meliputi aspek – aspek seperti kegunaan kepada orang lain dan kemandirian fisik. Domain sosial ekonomi berkaitan dengan standar hidup, kondisi lingkungan, teman-teman dan sebagainya. Domain psikologis/spiritual meliputi kebahagiaan, ketenangan, pikiran dan kendali atas kehidupan dan faktor lainnya. Domain keluarga meliputi kebahagiaan keluarga, anak-anak, pasangan dan kesehatan keluarga.

Menurut Ghozally (dalam Larasari, 2009) faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup diantaranya mengenali diri sendiri, adaptasi merasakan penderitaan orang lain, perasaan dan kasih sayang, bersikap optimis, mengembangkan sikap empati.

Faktor – Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup:

a. Jenis kelamin

Fadda dan Jiron (1999) mengatakan bahwa laki- laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam peran serta akses dan kendali terhadap berbagai sumber sehingga kebutuhan atau hal-hal yang penting bagi laki-laki dan perempuan juga akan berbeda. Ryff dan Singer (1998) mengatakan bahwa secara umum, kesejahteraan laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda, namun perempuan lebih banyak terkait dengan aspek hubungan yang bersifat positif sedangkan kesejahteraan laki-laki lebih terkait dengan aspek pendidikan pekerjaan yang lebih baik.

b. Usia

Wagner, Abbott dan Lett (2004) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang terkait dengan usia dalam aspek-aspek kehidupan yang penting bagi individu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ryff dan Singer (1996) individu dewasa mengekspresikan kesejahteraan yang lebih tinggi pada usia dewasa madya (60 tahun).

c. Pendidikan

Pendidikan juga merupakan faktor kualitas hidup, senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahl dkk (2004) menemukan bahwa kualitas hidup akan meningkat seiring dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi yang dicapai oleh individu.

d. Pekerjaan

Hultman, Hemlin dan H "ornquist (2006) menunjukkan dalam hal kualitas hidup juga diperoleh hasil penelitian yang tidak jauh berbeda dimana individu yang bekerja memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan individu yang tidak bekerja .

e. Status pernikahan

Penelitian yang dilakukan Hultman, Hemlin dan H "ornquist (2006), secara umum menunjukkan bahwa individu yang menikah memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi daripada individu yang tidak menikah atau bercerai.

2.3 Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB)

2.3.1 Konsep Kampung KB

Kampung KB merupakan program strategis dalam meretas kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, kampung atau dusun yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait lainnya yang dilaksanakan secara sistematis dan sistematis. Kampung KB merupakan salah satu model pelaksanaan total program KKBPK serta merupakan program strategis dalam upaya percepatan agenda program pembangunan khususnya pada daerah pinggiran.

Kampung KB dibentuk sebagai salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

2.3.2 Tujuan Kampung KB

Secara umum, tujuan program Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Sedangkan secara khusus, Kampung KB bertujuan untuk :

1. Meningkatkan peran pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta untuk menyelenggarakan program kependudukan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.
3. Meningkatkan peserta KB aktif.
4. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) serta Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
5. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
7. Menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung.
9. Meningkatkan lingkungan kampung yang bersih dan sehat.
10. Meningkatkan angka partisipasi sekolah.

2.3.3 Prasyarat Pembentukan Kampung KB

Dalam petunjuk teknis pelaksanaan Kampung KB dari BKKBN, perlu diperhatikan beberapa persyaratan dalam menentukan suatu wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB, yaitu :

- a. Tersedianya data kependudukan yang akurat. Data ini bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data Potensi Desa dan data Catatan Sipil yang akan digunakan

sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah Kampung KB secara berkesinambungan.

- b. Dukungan dan komitmen pemerintah daerah. Dukungan, komitmen dan peran aktif seluruh instansi/organisasi perangkat daerah (OPD), Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB. Selain itu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang dan urusan masing-masing OPD untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- c. Partisipasi aktif masyarakat adalah partisipasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di Kampung KB secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.3.4 Kriteria Pemilihan Wilayah Kampung KB

Dalam memilih dan menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB ada tiga kriteria yang dipakai, yaitu :

- a. Kriteria Utama
 1. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS I (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS I tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berada.
 2. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan dimana lokasi kampung tersebut.
- b. Kriteria Wilayah dalam pembentukan Kampung KB mencakup 10 kategori wilayah (dipilih salah satu), yaitu :
 1. Kumuh
 2. Pesisir atau Nelayan

3. Daerah Aliran Sungai (DAS)
4. Bantaran Kereta Api
5. Kawasan Miskin (termasuk miskin perkotaan)
6. Terpencil
7. Perbatasan
8. Kawasan Industri
9. Kawasan Wisata
10. Padat Penduduk

c. Kriteria Khusus

1. Kriteria data dimana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari Hasil Pendataan Keluarga, Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akurat.
2. Kriteria kependudukan dimana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah.
3. Kriteria program Keluarga Berencana dimana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa atau kelurahan.

2.4 Kerangka Pikir

Dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan masyarakat dapat menjamin cita-cita keberhasilan pembangunan nasional. Masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi harus dapat menjadi subjek atau pelaku pembangunan. Tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat dari waktu ke waktu. IPM mencakup pembangunan pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Idealnya dengan meningkatnya pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat maka akan meningkat pula pendapatannya.

Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Pada masa orde baru hingga sebelum reformasi, program Keluarga Berencana identik dengan penggunaan alat kontrasepsi. Seiring dengan perkembangan jaman, pemerintah mengembangkan inovasi strategis berupa Kampung KB. Dengan program nasional ini, harapannya persoalan-persoalan kependudukan dapat teratasi melalui peningkatan kualitas keluarga dan kualitas masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Kampung KB merupakan salah satu kebijakan yang harus di implementasikan di tengah-tengah masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Implementasi kebijakan Kampung KB akan berhasil apabila didukung oleh komitmen dan sumberdaya pelaksana program Kampung KB. Selain itu sumberdaya lain yang perlu

diperhitungkan juga adalah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Sejak dicanangkan secara nasional pada Januari 2016, target pengembangan Kampung KB di setiap wilayah kecamatan hingga desa tertinggal dan terpencil dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan sumberdaya waktu.

Dengan adanya koordinasi dan sinergitas lintas sektor terkait dimana hal ini merupakan variabel komunikasi antar organisasi akan mempercepat pencapaian implementasi kebijakan Kampung KB. Di era pemerintahan Jokowi-JK, Kampung KB merupakan perwujudan Nawacita ke-3, ke-5 dan ke-8. Selain itu komitmen terhadap pengembangan Kampung KB sangat dipengaruhi kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

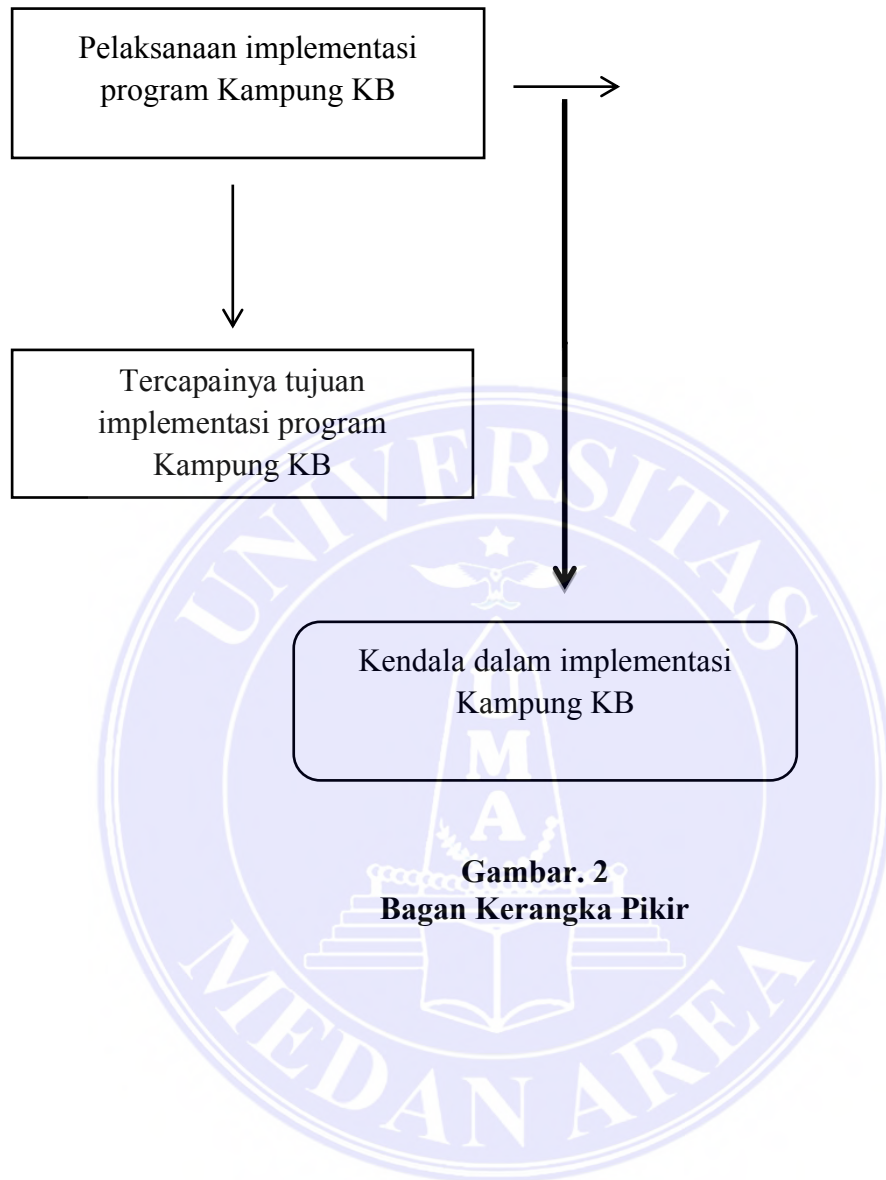
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:141) yang menyatakan bahwa ada enam variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Enam variabel tersebut adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir tersebut digambarkan sebagai berikut :

Upaya peningkatan kualitas keluarga dan kualitas masyarakat melalui program Kampung KB (Undang-Undang Nomor 52



Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:141), terdapat enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik, yaitu :

1. ukuran dan tujuan kebijakan
2. sumberdaya
3. karakteristik agen pelaksana
4. sikap kecenderungan para pelaksana



Gambar. 2
Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Lexy J. Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang ada melalui subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif juga berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Data yang dikumpulkan berupa hasil dari wawancara, gambar, catatan dan dokumentasi di lapangan, dokumen pendukung seperti peraturan/regulasi. Penggunaan metode tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang implementasi program Kampung KB dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga di Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Adapun instansi yang menjadi lokasi penelitian yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 14 Rantauprapat.

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada akhir tahun 2018 hingga tahun 2019 (jadwal penelitian terlampir di bawah ini).

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan sesuai dengan jadwal di bawah ini :

Uraian Kegiatan	Oktober				Nopember				Desember				Januari-Juni				Juli				Agustus			
	2018				2018				2018				2019				2019				2019			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal	■	■	■	■																				
Seminar Proposal								■																
Perbaikan Proposal									■	■	■	■												
Pengambilan data penelitian													■	■	■	■								
Penyusunan Skripsi																	■	■	■	■				
Seminar Hasil																		■	■	■				
Perbaikan Skripsi																					■	■	■	■
Sidang Meja Hijau																								■

Gambar. 3
Jadwal Pelaksanaan Penelitian

1.3 Informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam mengumpulkan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Teknik *sampling* yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *purposive sample*.

Purposive sample adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2009 : 85). Selanjutnya menurut Ari Kunto (2010:183) pemilihan sampel secara *purposive* pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
2. Subyek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada ciri-ciri (*key subjective*).
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi pendahuluan.

Menurut Suyanto (2005:171), proses penelitian pada informan penelitian ini meliputi beberapa macam yaitu :

1. Informan Kunci (*Key Informan*) adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian yaitu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penggerakan dan Penyuluhan.
2. Informan Utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti yaitu Kepala Desa Pondok Batu, Fasilitator Kampung KB Pondok

Batu, Pokja Kampung KB, Kader di Kampung KB, Petugas Lapangan Keluarga Berencana Desa Pondok Batu.

3. Informan Tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial di Kampung KB yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis DPPKB.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Dengan demikian data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Menurut Sugiono (2009:225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dan gabungan atau gabungan dari ketiganya (triangulasi).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

1. Observasi yaitu : pengamatan yang dilakukan terhadap obyek dan situasi di lapangan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Kampung KB Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu. Selain itu observasi juga akan dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu dan UPT. Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kecamatan Bilah Hulu.

2. Wawancara yaitu : proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara atanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan informan (orang yang diwawancarai. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu obyek penelitian. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan program Kampung KB di Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.
3. Dokumentasi merupakan metode pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari wawancara dan observasi akan lebih dapat dipercaya bila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang telah ada. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dengan mengumpulkan data tertulis, arsip maupun gambar-gambar yang berkaitan dengan kegiatan dan program Kampung KB. Profil Desa Pondok Batu berisikan informasi potensi yang dimiliki dan akan dijadikan data awal tentang kondisi desa tersebut.
4. Triangulasi data merupakan upaya pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat tiga metode triangulasi yaitu :
 - a) Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber kemudian dikategorisasikan mana pandangan yang sama dan spesifik.

- b) Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner.
- c) Triangulasi waktu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi di lapangan maka dilakukan analisis terhadap data-data tersebut. Proses analisis data pada penelitian ini meliputi tiga langkah yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan pengambilan kesimpulan/verifikasi. Untuk lebih jelasnya ketiga proses tersebut adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data, yaitu proses untuk memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis mempertajam, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta

mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

2. Penyaji data, yaitu : data dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuannya adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matriks, atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan menyajikan kesimpulan informasi yang tidak membosankan.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi, yaitu dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data setelah data yang terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara. Setelah data benar-benar lengkap, maka diambil kesimpulan akhir.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas) dan *confirmability* (obyektivitas).

1. Uji *credibility* (validitas internal)

Penjaminan keabsahan data melalui derajat kredibilitas dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria teknik pemeriksaan antara lain :

- a. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan ini peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan kembali yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

b. Meningkatkan ketekunan

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan upaya pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.

2. Pengujian *Transferability* (validitas eksternal)

Dalam *transferability* peneliti harus memberikan uraian rinci, jelas dan sistematis dan dapat dipercaya. Hal ini dilakukan agar orang lain yang membaca hasil penelitian dapat memutuskan apakah hasil penelitian tersebut dapat diaplikasikan atau tidak.

3. Pengujian *dependability*

Uji *dependability* dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian mulai dari wawancara, dokumentasi hingga observasi. Uji ini dapat dilakukan oleh pembimbing.

4. Pengujian *confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* hampir sama dengan uji *dependability* sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses penelitian yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan melalui derajat kepercayaan dengan menggunakan triangulasi sumber dan waktu dengan membandingkan data hasil wawancara dari sumber yang berbeda (informan yang berbeda). Selain itu dilakukan pengamatan (observasi) di lapangan. Data dari beberapa sumber tersebut kemudian dikategorisasikan berdasarkan kesamaan atau perbedaan jawaban/respon maupun jawaban yang spesifik.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Lexy J. Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang ada melalui subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif juga berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Data yang dikumpulkan berupa hasil dari wawancara, gambar, catatan dan dokumentasi di lapangan, dokumen pendukung seperti peraturan/regulasi. Penggunaan metode tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang implementasi program Kampung KB dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga di Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Adapun instansi yang menjadi lokasi penelitian yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 14 Rantauprapat.

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada akhir tahun 2018 hingga tahun 2019 (jadwal penelitian terlampir di bawah ini).

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan sesuai dengan jadwal di bawah ini :

Uraian Kegiatan	Oktober				Nopember				Desember				Januari-Juni				Juli				Agustus			
	2018				2018				2018				2019				2019				2019			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal	■	■	■	■																				
Seminar Proposal								■																
Perbaikan Proposal								■																
Pengambilan data penelitian											■	■												
Penyusunan Skripsi															■	■								
Seminar Hasil																			■					
Perbaikan Skripsi																			■	■	■	■		
Sidang Meja Hijau																								■

Gambar. 3
Jadwal Pelaksanaan Penelitian

1.3 Informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam mengumpulkan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Teknik *sampling* yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *purposive sample*.

Purposive sample adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2009 : 85). Selanjutnya menurut Ari Kunto (2010:183) pemilihan sampel secara *purposive* pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
2. Subyek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada ciri-ciri (*key subjective*).
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi pendahuluan.

Menurut Suyanto (2005:171), proses penelitian pada informan penelitian ini meliputi beberapa macam yaitu :

1. Informan Kunci (*Key Informan*) adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian yaitu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penggerakan dan Penyuluhan.
2. Informan Utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti yaitu Kepala Desa Pondok Batu, Fasilitator Kampung KB Pondok Batu,

Pokja Kampung KB, Kader di Kampung KB, Petugas Lapangan Keluarga Berencana Desa Pondok Batu.

3. Informan Tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial di Kampung KB yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis DPPKB.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Dengan demikian data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Menurut Sugiono (2009:225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dan gabungan atau gabungan dari ketiganya (triangulasi).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

1. Observasi yaitu : pengamatan yang dilakukan terhadap obyek dan situasi di lapangan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Kampung KB Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu. Selain itu observasi juga akan dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu dan UPT. Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kecamatan Bilah Hulu.

2. Wawancara yaitu : proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara atanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan informan (orang yang diwawancarai. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu obyek penelitian. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan program Kampung KB di Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.
3. Dokumentasi merupakan metode pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari wawancara dan observasi akan lebih dapat dipercaya bila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang telah ada. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dengan mengumpulkan data tertulis, arsip maupun gambar-gambar yang berkaitan dengan kegiatan dan program Kampung KB. Profil Desa Pondok Batu berisikan informasi potensi yang dimiliki dan akan dijadikan data awal tentang kondisi desa tersebut.
4. Triangulasi data merupakan upaya pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat tiga metode triangulasi yaitu :
 - a) Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber kemudian dikategorisasikan mana pandangan yang sama dan spesifik.

- b) Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner.
- c) Triangulasi waktu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi di lapangan maka dilakukan analisis terhadap data-data tersebut. Proses analisis data pada penelitian ini meliputi tiga langkah yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan pengambilan kesimpulan/verifikasi. Untuk lebih jelasnya ketiga proses tersebut adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data, yaitu proses untuk memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis mempertajam, menggolongkan,

mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

2. Penyaji data, yaitu : data dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuannya adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matriks, atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan menyajikan kesimpulan informasi yang tidak membosankan.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi, yaitu dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data setelah data yang terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara. Setelah data benar-benar lengkap, maka diambil kesimpulan akhir.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas) dan *confirmability* (obyektivitas).

1. Uji *credibility* (validitas internal)

Penjaminan keabsahan data melalui derajat kredibilitas dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria teknik pemeriksaan antara lain :

- a. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan ini peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan kembali yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

b. Meningkatkan ketekunan

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan upaya pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.

2. Pengujian *Transferability* (validitas eksternal)

Dalam *transferability* peneliti harus memberikan uraian rinci, jelas dan sistematis dan dapat dipercaya. Hal ini dilakukan agar orang lain yang membaca hasil penelitian dapat memutuskan apakah hasil penelitian tersebut dapat diaplikasikan atau tidak.

3. Pengujian *dependability*

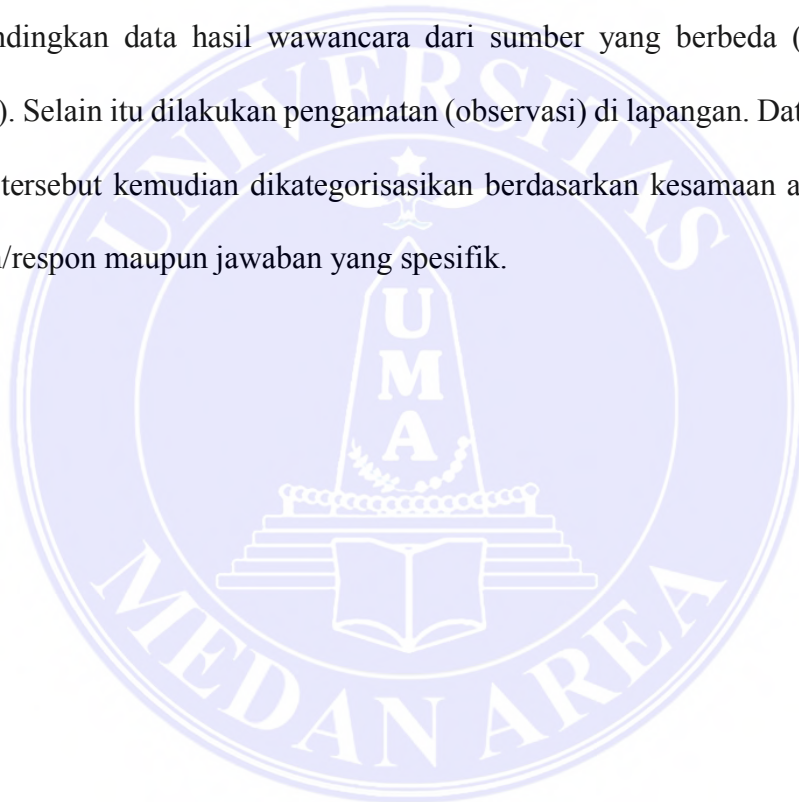
Uji *dependability* dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian mulai dari wawancara, dokumentasi hingga observasi. Uji ini dapat dilakukan oleh pembimbing.

4. Pengujian *confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* hampir sama dengan uji *dependability* sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.

Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses penelitian yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan melalui derajat kepercayaan dengan menggunakan triangulasi sumber dan waktu dengan membandingkan data hasil wawancara dari sumber yang berbeda (informan yang berbeda). Selain itu dilakukan pengamatan (observasi) di lapangan. Data dari beberapa sumber tersebut kemudian dikategorisasikan berdasarkan kesamaan atau perbedaan jawaban/respon maupun jawaban yang spesifik.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016. Pengantar Kebijakan Publik: Dari Adminitrasi Negara, Kebijakan Publik, Adminitrasi Publik, Pelayanan Publik, *Good Governance*, hingga Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Calpulis.
- Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Universitas Medan Area. 2017. Pedoman Penulisan Skripsi dan Tesis
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). Yogyakarta: PT. Buku Seru.

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Daerah Nomor 16 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Petunjuk Teknis Kampung KB oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 474/277/BP2KB/2016 tentang Penetapan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016

Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 474/131.1/DPPKB/2017 tentang Pembentukan

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2021.

Website BKKBN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

Access From (repository.uma.ac.id)

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016. Pengantar Kebijakan Publik: Dari Adminitrasi Negara, Kebijakan Publik, Adminitrasi Publik, Pelayanan Publik, *Good Governance*, hingga Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Calpulis.
- Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Universitas Medan Area. 2017. Pedoman Penulisan Skripsi dan Tesis
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). Yogyakarta: PT. Buku Seru.

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Daerah Nomor 16 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Petunjuk Teknis Kampung KB oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 474/277/BP2KB/2016 tentang Penetapan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016

Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 474/131.1/DPPKB/2017 tentang Pembentukan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2021.

Website BKKBN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

Access From (repository.uma.ac.id)